

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 213 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi dan menindaklanjuti penyelesaian gugatan yang mengikutsertakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan, perlu membentuk Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari pejabat/pegawai pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menangani dan menyelesaikan perkara dalam persidangan;
- b. menghadap di muka Pengadilan;
- c. menghadiri seluruh acara persidangan;

- d. menghadap Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera dan pihak-pihak lain;
- e. menerima dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan atau bersangkutan dengan perkara, memberikan keterangan/ penjelasan, mengadakan perdamaian;
- f. membuat, menandatangani, mengesahkan dan mengajukan: eksepsi, segala permohonan, surat jawaban, gugatan rekonvensi, duplik, replik rekonvensi, bukti-bukti, kesimpulan, risalah banding dan memori/ kontra memori banding, risalah kasasi, memori/ kontra memori kasasi, peninjauan kembali, segala rekes-rekes dan lain-lain surat yang diperlukan;
- g. mengajukan saksi/ ahli, mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli, mengajukan dan mempelajari bukti-bukti;
- h. menolak saksi/ ahli atau bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak lain;
- i. menyatakan banding, menyatakan kasasi dan meminta perkara agar diperiksa kembali dengan peninjauan kembali;
- j. mengambil segala tindakan jaminan, membuat dan menyuruh menjalankan segala perintah juru sita, pemberitahuan, panggilan-panggilan dan menghadiri pemberitahuan/ teguran-teguran dari Pengadilan-pengadilan dan lain-lain;
- k. mengajukan atau mempertimbangkan usul penyelesaian perkara secara damai; dan
- l. melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan berguna selaku Kuasa Hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan pelaksanaan persidangan dan/atau pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam diktum KEDUA.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tim Beracara Dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM BERACARA
DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 213 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2022

NAMA TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN
MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
1.	Robin Asad Suryo NIP. 19650809 199003 1 001	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Sarah Sadiqa NIP. 19700118 199603 2 002	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Gatot Pambudhi Poetranto NIP. 19681012 199011 1 001	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Sutan Suangkupon Lubis NIP. 19640323 199203 1 005	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5.	Setya Budi Arijanta NIP. 19701231 199503 1 001	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
6.	Suharti NIP. 19730627 199803 2 002	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
7.	Raden Ari Widiyanto NIP. 19690813 199703 1 001	Direktur Pengembangan Strategi	Direktorat Pengembangan Strategi

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
		dan Kebijakan Pengadaan Khusus	dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Rinaldi Morintosh NIP. 19810509 201012 1 001	Analisis Hukum Madya	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
9.	Mustika Rosalina Putri NIP. 19841121 201012 2 001	Analisis Kebijakan Madya	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
10.	Rasmita Juliana Sitepu NIP. 19880709 201502 2 001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
11.	Himawan Giri Dahlan NIP. 19820822 201012 1 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
12.	Desi Kartika NIP. 19891212 201211 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
13.	Muhammad Qadr Siddiq Zam NIP. 19840621 201402 1 001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
14.	Hilman Fazri NIP. 19890312 201402 1 001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
15.	Sari Melani NIP. 19800224 201012 2 001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
16.	Febri Kamalisa Rachman NIP. 19840208 201502 2 001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
17.	Ardian Hoppin Sitompul NIP. 19880522 201502 1 001	Analisis Hukum Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
18.	Benny Leopold Dumais NIP. 19890530 201502 1 001	Analisis Hukum Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
19.	Asih Riska Nurmasari NIP. 19940725 201902 2 005	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
20.	Cherish Shery Desarya NIP. 19881220 201902 2 002	Analisis Hukum Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
21.	Dian Arsita Wardhani NIP. 19840823 201502 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
22.	Eben Henry Reagen Mangihut Simanjuntak NIP. 19870515 201502 1 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
23.	Eva Sari Dewi NIP. 19830417 201502 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
24.	Mega Chandra Sera NIP. 19940614 201902 2 002	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
25.	Joko Budi Sulistyono NIP. 19911001 202203 1 004	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
26.	Andi Putri Fathania Nur Ranti F. NIP. 19950315 202203 2 003	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
27.	Katri Kusuma Adi NIP. 19961029 202203 1 002	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
28.	Arif Hilmi Aziz NIP. 19971114 202203 1 002	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
29.	Desak Putu Ayunda Putri NIP. 20000619 202203 2 001	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
30.	Carolina Maria Anggreini NIP. 19930113 201902 2 002	Analisis Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
31.	Yogie Prastiyans NIP. 19910706 201902 1 002	Analisis Berkas Sengketa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
32.	Syukri NIP. 19921124 201801 1 001	Pelaksana	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
33.	Mahatmya Widyasri	Staf Pendukung Unit Kerja	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
34.	Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten	Staf Pendukung Unit Kerja	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
35.	Siti Aminah	Staf Pendukung Unit Kerja	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI